

Nama : Muhammad Syafiq Alfarazi

Nim : 141240593

Kelas : EM-P

Analisis Kasus Ekonomi Mikro

1. Kasus yang dibahas

Akhir-akhir ini, dunia pendidikan dikejutkan dengan kenaikan uang kuliah tunggal atau (UKT) di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Penolakan dan unjuk rasa terjadi di mana-mana untuk menentang kebijakan tersebut. Kenaikan UKT dinilai memberatkan mahasiswa meskipun telah ada beberapa program KIP dan beasiswa yang telah disediakan pemerintah. Berdasarkan pernyataan tersebut penulis ingin mengangkat kasus analisis Ekonomi Mikro yang berjudul “ Dampak Kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Bagi Mahasiswa Dan Orang Tua Di Indonesia”.

2. Deskripsi kasus

Kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) tahun 2024 telah menjadi isu kontroversial dan menimbulkan polemik baik di kalangan mahasiswa maupun dunia pendidikan. Di satu sisi, kenaikan UKT dianggap bermanfaat untuk menciptakan pendidikan tinggi yang berkualitas, namun di sisi lain kenaikan UKT menimbulkan kekhawatiran terhadap penurunan aksesibilitas dan kesetaraan pendidikan (Syakira, 2024). Akibatnya, banyak unjuk rasa penolakan terjadi di mana-mana terkait disahkannya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024) mengenai penerapan sistem UKT.

Bahkan ada kampus berbadan hukum yang menaikan UKT hingga menyentuh angka Rp164-200 juta (Nurmuhaemin, 2024). Meskipun Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim pada akhirnya memutuskan untuk menunda sementara kenaikan UKT 2024 sesuai arahan Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istora Senayan tanggal 27 Mei 2024, bukan berarti persoalan telah usai karena kenaikan UKT tetap akan direalisasikan tahun depan.

3. Identifikasi Konsep Ekonomi

Penulis menggunakan Teori Elastisitas Harga dan Teori Biaya Opportunity untuk mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan dampak negatif *Kenaikan UKT di sebagian PTN di Indonesia*. Teori Elastisitas Harga adalah ukuran seberapa sensitif permintaan dan penawaran suatu barang terhadap perubahan harga. Jika permintaan pendidikan tinggi elastis, kenaikan UKT yang signifikan dapat menyebabkan penurunan jumlah pendaftar, sebaliknya jika permintaan inelastis, kenaikan harga mungkin tidak banyak memengaruhi jumlah pendaftar (Budi S, 2009).

Teori Biaya Opportunity adalah biaya opportunity dari suatu tindakan merupakan peluang yang hilang, atau biaya yang terjadi dengan melaksanakan tindakan tersebut, daripada melaksanakan alternatif terbaik. (Samuelson dan Nordhaus 1992: 154).

4. Analisis Ekonomi

- Penerapan Teori Elastisitas Harga pada permasalahan Kenaikan UKT adalah jika ada alternatif pendidikan yang lebih murah, elastisitas permintaannya akan lebih tinggi, artinya mahasiswa lebih mudah beralih ke alternatif yang lain jika UKT naik.
- Pendidikan dianggap sebuah kebutuhan, sehingga elastisitas permintaan cenderung akan lebih rendah. Namun, jika pendidikan dianggap lebih mewah, elastisitasnya akan meningkat lebih tinggi.
- Kenaikan UKT juga dapat menimbulkan tekanan finansial dan psikologis bagi mahasiswa serta orang tua, memperparah kesenjangan sosial ekonomi keluarganya.

5. Solusi Yang Berkelanjutan

Setelah melakukan tahapan analisis konsep-konsep ekonomi, penulis menemukan beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan terkait kenaikan UKT, berikut ini adalah beberapa solusi:

- Dukungan Pemerintah : Pemerintah perlu terlibat dalam memberikan bantuan dan dukungan kepada Perguruan Tinggi Negeri untuk menjaga agar biaya pendidikan tetap terjangkau bagi semua kalangan masyarakat.
- Bantuan Keuangan : Perguruan Tinggi Negeri dapat memberikan bantuan keuangan seperti beasiswa atau skema pembayaran yang fleksibel untuk membantu mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi atau finansial.

6. Dampak dari Solusi

Setelah menemukan beberapa solusi, penulis juga mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dari solusi tersebut secara berkelanjutan, Diantaranya yaitu bantuan keuangan yang signifikan untuk mahasiswa kurang mampu, dapat meningkatkan aksesibilitas pendidikan yang tinggi, juga meningkatkan jumlah mahasiswa yang dapat memanfaatkan bantuan keuangan, baik berupa beasiswa maupun keringanan biaya yang dikeluarkan oleh orang tua.

7. Alternatif lain

Alternatif lain yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah Diversifikasi Sumber Pendapatan Universitas atau Perguruan Tinggi Negeri dengan cara, Universitas dapat meningkatkan pendapatan melalui jasa riset dan konsultasi, Badan Usaha Milik Kampus (BUMK), dan Monetisasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Selain itu Universitas atau Perguruan Tinggi Negeri dapat berkolaborasi dengan pemerintah guna menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung keberlanjutan

dan kualitas pendidikan yang baik, mendorong pengembangan program pendidikan yang terjangkau untuk semua lapisan masyarakat, tidak hanya kebutuhan tersier, juga dapat meningkatkan kuota beasiswa pendidikan yang lebih luas, untuk membantu mahasiswa kurang mampu.

8. Kesimpulan

UKT yang membebani mahasiswa perlu segera dihentikan. Beberapa dampak yang ditimbulkan seperti penyusutan aksesibilitas pendidikan, tekanan finansial dan psikologis mahasiswa, kesenjangan sosial ekonomi, hingga komersialisasi pendidikan menunjukkan bahwa kenaikan UKT 2024 melalui Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 perlu dievaluasi. Kenaikan UKT di berbagai perguruan tinggi di Indonesia secara serempak menunjukkan bahwa negara perlu melakukan pembenahan lebih sistematis dengan meluruskan kembali peran dan fungsi negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Komisi X DPR RI perlu mendorong Kemendikbudristek untuk meninjau ulang Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 dan melakukan evaluasi terhadap otonomi PTN-BH terkait jenis-jenis pendapatan, terutama dari bidang akademik. Hal ini dilakukan agar ada standar minimum dan maksimum nominal UKT sehingga tidak membebani mahasiswa. Melalui fungsi legislasi, Komisi X DPR RI perlu melakukan revisi UU Dikti. Revisi diperlukan untuk mengembalikan status perguruan tinggi menjadi PTN. Selama perguruan tinggi tetap berstatus PTN-BH maka biaya UKT akan tetap melambung tinggi dan menjadikannya sebagai lahan bisnis.

9. Referensi

N. Gregory, Mankiw. (2018). *Pengantar Ekonomi Mikro Edisi Ketujuh*. Salemba Empat.

Dewi, Nopita. (2024, Mei 8). Kenaikan UKT di berbagai kampus disorot. *Metrotvnews.com*. Diakses 28 Agustus 2024 dari <https://www.metrotvnews.com/play/NgxCVp4Z-kenaikan-ukt-di-berbagai-kampus-jadi-sorotan>

Lumbarau. (2024, Januari 27). ITB tawarkan bayar kuliah pakai pinjol: kenapa dikritik dan apa akibatnya. *Bbc.com*. Diakses pada 28 Agustus 2024 dari <https://www.Bbc.com/Indonesia/articles/cqedln6qr0mo>.

Nurmuhaemin, Waode. (2024, Mei 21). *Mewaspada jangka Panjang kenaikan UKT*. *Detiknews.com*. Diakses 28 Agustus 2024 dari <https://news.detik.com/kolom/d-7349598/mewaspada-dampak-jangka-panjang-kenaikan-ukt>.

Syakira, Nada. (2024, Mei 27). *Pemerintah: peningkatan mutu pendidikan menjadi alasan kenaikan UKT di PTN*. *Kumparan.com*. Diakses 28 Agustus 2024 dari

<https://kumparan.com/nada-syakira-1708706098129736900/pemerintah-peningkatan-mutu-pendidikan-menjadi-alasan-kenaikan-iukt-di-ptn-22odlg7bswe>.